

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiek soemarmi & Sekar Anggun, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (semarang: Undip Press, 2016).

Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995).

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Fence M. Wantu, *Studi Efektifitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi*, (Gorontalo: Pusat Penelitian dan Pengajuan Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2017).

Irianto, S. *Problematika Hakim, Peradilan dan Masyarakat Indonesia: Studi Socio Legal*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2017).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2021).

Jimly Asshiddiqie, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004).

Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2017).

Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2010).

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi, (Jakarta, Sekretariat Jendela dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Saldi Isra & Januari Sibotang, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi* (Jakarta: Tahir Foundation, 2016)

Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: LeIP dan SEAP, 2014).

Thalib, A. R., & Sh, M. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 2018).

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010).

JURNAL

Achmad Edi, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UDD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, (2012).

AD. Basniwati, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 5, (2014).

Ahmad Fadhil Sumandi, “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, (2011).

Aidul Fitriciada Azhari. “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan”. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, (2005).

Artidjo Alkostar, “Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Vol. 20, No. 38, (2005).

Ashari & Riska Ari Amalia, “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, (2023).

Aydin, “Kemandirian Peradilan di Berbagai Rezim Demokratis: Memahami Dampak yang Berbeda-beda dari Persaingan Politik”, *Law and Society Review*, Vol.47, (2013)

Cyriilus Wilton & dkk, “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan,” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika*, Vol. 1 No. 2, (2022).

Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia.” *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4, (2017).

- Darmadi, N. S. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 26, No. 2, (2011).
- Faqih, Mariyadi. “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, (2016).
- Farid Suffian Shuaib, “Pengangkatan Hakim Malaysia: Tinjauan Umum Reformasi”, *Jurnal Penelitian Ilmu Terapan*, Vol.7, No.13, (2011)
- Fence M. Wantu & dkk. “Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi : Problematika dan Model Ke Depan” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, (2021).
- Fitri & dkk, “Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat” *Jurnal Humani Universitas Semarang*, Vol. 13, No. 2 (2023).
- Hamdan Zoelva, “Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI Tahun 1945”, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 4, (2017).
- Indramayu & Dkk, “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.1, (2017)
- Iwan Satriawan & Tanto Lailam, “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, (2021)
- Henry Arianto, “Implementasi konsep *good governance* di Indonesia”. *Jurnal Forum Ilmiah Indonesia*, Vol.3, (2006)

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia". *Majalah Hukum Nasional*, 1, (2011).

Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Solusi*, Vol. 17, No.2 (2019).

Kariadi, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 6, No. 2, (2020).

Karimatul Khasanah, "Problematisa Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang dibuat Oleh BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (2018).

Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, (2019).

Meirina Fajarwati, "Reformulasi Proses Rekrutment Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, (2016)

Miftahul & Faisal, "Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6, No. 3, (2022).

Mira Fajriah, "Refraksi Dan Alinasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, (2015).

Muhammad & Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim

Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 4, (2023).

Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol. 2 No. 1, (2014).

Rifqi Sjarief Asegaf, “Hanya Hakim yang Bersih dan Kompeten yang Layak Adili Koruptor”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No.1, (2002).

Sarah Sabrina & Khalid, “Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* Vol. 9, No. 2, (2023).

Susianto, “Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa”. *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2024).

Syaihul Hadi, “Keabsahan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Usulan Dewan Perwakilan Rakyat” *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 7, No. 4, (2023).

Taruna, B. L. “Ide Mengakomodasi Constitutional Complain sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia”. *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, (2010).

Winda wijayanti & dkk, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrumen Calon Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (2015)

Yance Arizona, “Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, (2008).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

SKRIPSI

Ahmad Saiful Huda, “Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, Skripsi, (Salatiga: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023).

Agung Sudrajat, Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi di Indonesia. (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012)

Handini, A. T. “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)”. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Rezky Hasibuan, “Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia” Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

INTERNET

Adhyasta, “Aswanto Mendadak Diberhentikan dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, tapi Produk DPR Dia Anulir” *Kompas*, 30 September 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Ady Thea, “Ridwan Mansyur Lolos Seleksi Calon Hakim Konstitusi Unsur MA”, *Hukumonline*, 3 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ridwan-mansyur-lolos-seleksi-calon-hakim-konstitusi-unsur-ma-lt651c0ffb9f6b8/> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Andi Saputra, “Tanpa Seleksi yang Transparan, Hakim Konstitusi Anwar Usman Dipertanyakan”, *Detiknews*, 8 April 2016,

<https://news.detik.com/berita/d-3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan>, (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Friski Riana, Seleksi Hakim MK Pengganti Maria Farida Segera Dibuka, *Tempo*, 2 Mei 2018, <https://www.tempo.co/politik/seleksi-hakim-mk-pengganti-maria-farida-segera-dibuka-932363> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Muhammad Adimaja, “Arief Hidayat Lolos Uji Kelayakan Hakim MK Meski Diprotes”, *Tempo*, 6 Desember 2017, <https://www.tempo.co/politik/arief-hidayat-lolos-uji-kelayakan-hakim-mk-meski-diprotes-1020736> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Nahda Utami, “Hakim MK Aswanto ‘Dicopot’, Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir,” 30 September 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>, (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

“Patrialis Akbar tidak layak menjadi Hakim Konstitusi” *Indonesia Corruption Watch*, 31 Juli 2013, <https://antikorupsi.org/id/article/patrialis-akbar-tidak-layak-menjadi-hakim-konstitusi> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

“Penunjukan Tak Transparan, Ketua MK Hamdan Zoelva Ikut Digugat” *Gresnews*, 31 Desember 2013, <https://www.gresnews.com/artikel/83372/Penunjukan-Tak-Transparan-Ketua-MK-Hamdan-Zoelva-Ikut-Digugat/> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Sandro Gatra, “KY Rekomendasikan Ahmad Fadlil dan Manahan Sitompul sebagai Calon Hakim Konstitusi”. *Kompas.com*, 12 November 2014,
<https://nasional.kompas.com/read/2014/11/12/15355611/KY.Rekomendasikan.Ahmad.Fadlil.dan.Manahan.Sitompul.sebagai.Calon.Hakim.Konstitusi> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025).

Syamsuddin Radjab, ”Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi”, 14 Desember 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi>, (diakses pada 30 Mei 2025).

Yustinus Patris Paat, “Gantikan Aswanto, Ternyata Guntur Hamzah Ikuti Fit and Proper Test Kilat di DPR” *Beritasatu*, 1 Oktober 2022,
<https://www.beritasatu.com/nasional/983893/gantikan-aswanto-ternyata-guntur-hamzah-ikuti-fit-and-proper-test-kilat-di-dpr>
(diakses pada tanggal 30 Mei 2025).